

## KETERLIBATAN INTRAPRENEURSHIP DIGITAL DAN INOVASI LAYANAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN TATA KELOLA BERNILAI PUBLIK BERKELANJUTAN

Novita Ekasari<sup>1</sup>, Budi Karyanto<sup>2</sup>

[novitasarimrskaryanto@gmail.com](mailto:novitasarimrskaryanto@gmail.com)<sup>1</sup>, [budhyka@gmail.com](mailto:budhyka@gmail.com)<sup>2</sup>

Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global Tangerang<sup>1</sup>, Universitas Utadaka Swastika Tangerang<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Masalah tata kelola bernilai publik di Kota Tangerang terlihat dari lemahnya daya saing sumber daya manusia, khususnya pegawai ASN Daerah, proses modernisasi infrastruktur dan layanan publik yang belum optimal, serta pertumbuhan ekonomi kreatif daerah yang belum merata dan mandiri. Tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris pengaruh keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah terhadap tata kelola yang bernilai publik berkelanjutan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pegawai daerah yang bertugas sebagai sekretaris luruh, luruh, sekretaris camat maupun camat di Kota Tangerang sebagai responden penelitian sebanyak 45 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam intrapreneurship digital memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan tata kelola bernilai publik yang berkelanjutan. Selain itu, inovasi layanan daerah juga berkontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola tersebut. Secara bersama-sama, keterlibatan dalam intrapreneurship digital dan inovasi daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik yang berkelanjutan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan keterlibatan kerja pegawai ASN Daerah Kota Tangerang melalui penciptaan ekosistem digital seperti peningkatan literasi digital teknologi informasi, kreativitas kerja melalui pemanfaatan media sosial, pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan budaya daerah, serta pengembangan struktur organisasi yang adaptif dan terintegrasi untuk mendukung ekonomi kreatif daerah.

**Kata Kunci:** Keterlibatan Intrapreneurship Digital, Inovasi Layanan Daerah, Tata Kelola Bernilai Publik Berkelanjutan.

### ABSTRACT

*Public value governance problems in the City of Tangerang can be seen from the weak competitiveness of human resources, especially regional ASN employees, the process of modernizing infrastructure and public services that is not yet optimal, as well as the growth of the regional creative economy that is not yet evenly distributed and independent. The aim of the research is to empirically test the influence of digital intrapreneurship involvement and regional service innovation on governance with sustainable public value. This quantitative research used regional employees who served as sub-district secretaries, sub-district heads, sub-district secretaries and sub-district heads in Tangerang City as research respondents totaling 45 people. The research results show that involvement in digital intrapreneurship has a positive influence on improving sustainable public value governance. Apart from that, regional service innovation also contributes positively to improving governance. Together, involvement in digital intrapreneurship and regional innovation has a positive influence on sustainable public value governance. The practical implication of this research is to provide recommendations for increasing the ability, competence and work involvement of Tangerang City Regional ASN employees through the creation of a digital ecosystem such as increasing digital literacy in information technology, work creativity through the use of social media, developing a creative economy based on local wisdom and regional culture, as well as developing an adaptive and integrated organizational structure to support the regional creative economy.*

**Keywords:** Digital Intrapreneurship Engagement, Regional Service Innovation, Sustainable Public

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola bernilai publik adalah sebuah gerakan dalam administrasi publik yang lebih maju daripada konsep tata kelola organisasi yang baik. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan jaringan yang melibatkan berbagai sektor. Menurut Anggriani (2016), tata kelola bernilai publik adalah pengelolaan aktivitas organisasi pemerintah yang mengatur konsensus normatif mengenai hak, manfaat, dan hak prerogatif bagi warga negara, kewajiban mereka terhadap masyarakat, negara, dan sesama, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemerintahan dan kebijakan. Dengan demikian, tata kelola bernilai publik dapat dipahami sebagai konsep dan praktik pengelolaan serta administrasi organisasi pemerintah untuk memenuhi konsensus normatif dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Upaya menciptakan tata kelola bernilai publik muncul sebagai paradigma baru yang pertama kali diperkenalkan oleh Williams dan Shearer pada awal tahun 2011. Kedua ahli tersebut menjelaskan adanya evolusi berkelanjutan dalam pengelolaan organisasi publik yang kemudian dikenal dengan konsep *The New Public Service (NPS)*. Fokus dari *new public service* terletak pada semangat kolaborasi dan demokrasi. Perspektif yang dikembangkan dalam paradigma ini lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan *new public management* dan *traditional management*. *New public service* menjadi perspektif yang menggabungkan konsep dan praktik tata kelola bernilai publik.

Pencapaian tata kelola bernilai publik diduga dapat terwujud melalui keterlibatan dalam *intrapreneurship* digital, kepemimpinan transformasional, dan penerapan inovasi daerah (Neessen et al., 2019, Blanka, 2019). Staub et al., (2019) menyatakan bahwa *intrapreneurship* di lingkungan pemerintah daerah adalah elemen penting dalam menjalankan kebijakan dan program kerja daerah. *Intrapreneurship* mengacu pada sikap dan perilaku pegawai dalam suatu organisasi untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan bisnis melalui ide dan inovasi guna mencapai tujuan organisasi. Konsep ini sering dipahami sebagai seorang *entrepreneur* yang bekerja dalam organisasi. Organisasi merekrut individu dengan jiwa kewirausahaan untuk memperkuat organisasi dan menerapkan *intrapreneurship* pada pegawai yang memiliki kemampuan dan karakteristik tertentu, untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, pengetahuan, dan kreativitas dalam strategi kerja. Sementara itu, *entrepreneurship*, menurut Blanka (2019), adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan mengkombinasikan sumber daya melalui cara-cara baru untuk memenangkan persaingan. Jiwa dan perilaku *entrepreneur* yang dikembangkan untuk mendukung pembentukan organisasi disebut *intrapreneurship*, yang memerlukan kemampuan manajerial seorang *entrepreneur* yang ada pada diri pegawai.

Keterlibatan *intrapreneurship* digital di kalangan aparatur sipil negara di pemerintah daerah mencerminkan jiwa, perilaku, dan semangat karyawan untuk bersikap proaktif dan inovatif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, yang didukung oleh keterampilan dan penguasaan teknologi digital (Clausen et al., 2020). Di era disruptif yang mengedepankan teknologi dan informasi secara digital, hal ini menjadi tantangan bagi aparatur sipil daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatan pegawai dalam suatu organisasi yang menunjukkan sikap, sifat, dan prinsip kerja yang mengadopsi nilai-nilai serta semangat kewirausahaan dalam pekerjaannya disebut *intrapreneurship* (Marques et al., 2022). Penerapan *intrapreneurship* merupakan kebijakan, strategi, dan budaya yang diadopsi oleh organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di dalamnya (Falola et al., 2017). Adapun

penguasaan literasi digital merujuk pada kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi dalam mengakses, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi (Alpkan & Gemici (2016), Gawke et al., (2017). Oleh karena itu, keterlibatan dalam intrapreneurship digital dipahami sebagai partisipasi pegawai organisasi dalam menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab penuh, berorientasi pada masa depan dan hasil, berani mengambil risiko, serta memiliki kreativitas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi melalui perangkat internet.

Pencapaian tata kelola bernilai publik sangat bergantung pada pengembangan dan penerapan inovasi yang diprakarsai oleh pemimpin daerah (Bentzen et al., 2020). Implementasi inovasi daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi. Inovasi ini bersifat sederhana, tidak memerlukan anggaran besar, dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Menurut (Scupola & Zanfei, 2016), inovasi dapat dipahami sebagai terobosan yang mencakup ide atau gagasan kreatif yang orisinal, yang kemudian diadaptasi dan dimodifikasi untuk memberikan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, bagi masyarakat. Inovasi juga dipandang sebagai suatu proses pembaruan, pengembangan, dan penciptaan hal-hal baru yang berbeda dari sebelumnya (Alpkan & Gemici, 2016). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, inovasi dikenal dengan istilah Innovative Governance, yang dicanangkan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2006. Inovasi ini berkaitan dengan pengembangan desain kebijakan dan prosedur operasional standar dalam paradigma baru pengelolaan organisasi publik untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Arshi & Rao, 2019). Dengan demikian, inovasi daerah dapat dipahami sebagai suatu terobosan, baik berupa ide, konsep, metode, prosedur, maupun sistem, yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, untuk melakukan serangkaian pembaruan, pengembangan, dan penciptaan hal-hal baru yang berbeda dari sebelumnya demi kepentingan masyarakat.

Fenomena praktis terkait keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah sebagai upaya untuk peningkatan tata kelola bernilai publik juga dapat ditemui di Indonesia. Sistem pengelolaan organisasi pemerintah di Indonesia mengacu pada prinsip desentralisasi, di mana tata kelola daerah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan daerah ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana undang undang ini memberikan otoritas dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah mereka secara otonom. Selain itu, pengelolaan ini juga mengikuti prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, serta melibatkan unsur masyarakat dan sektor swasta.

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang memiliki tata kelola bernilai publik yang representatif untuk mencapai terwujudnya smart city yang inovatif, ramah lingkungan serta menjadi solutif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Namun, pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) sebagaimana yang dipublikasikan pada situs resmi pemerintah kota Tangerang tanggal 21 Februari 2019 Walikota Arief R Wismansyah, mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan untuk lima tahun ke depan terbagi dalam tiga isu utama, yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Daerah. Menurutnya, terkait daya saing manusia, hal ini mencakup sektor pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pelayanan publik. Untuk masalah infrastruktur, fokusnya mencakup aspek jalan, pasokan air bersih, penanganan banjir dan genangan air, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, serta ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk ekonomi daerah, perhatian diberikan pada peningkatan ekonomi lokal, dengan fokus pada kesiapan dalam

sektor pangan daerah. Dalam rangka mengatasi isu-isu besar tersebut, Pemkot Tangerang telah merancang strategi pembangunan melalui misi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Untuk masalah infrastruktur, Pemkot Tangerang berkomitmen untuk membangun lebih banyak fasilitas kota yang berwawasan lingkungan. Sementara itu, untuk ekonomi daerah, upaya akan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan adil. Beberapa kegiatan yang menjadi fokus, seperti laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang mencapai enam persen, harus dipersiapkan lebih matang, terutama di sektor jasa. Hal ini penting karena Kota Tangerang sekarang lebih berorientasi pada sektor jasa, bukan lagi sebagai kota industri seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang memandang pentingnya kesiapan SDM yang memiliki daya saing untuk menghadapi berbagai tantangan. Seiring dengan itu, Pemkot Tangerang juga mengarahkan lebih banyak program kegiatan ke wilayah, bukan hanya di pusat kota, dengan harapan bisa mendorong kreativitas dan perkembangan warga.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang menguji tentang hubungan keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah terhadap tata kelola bernilai publik. penelitian tentang keterlibatan pegawai dan intrapreneurship terhadap tata kelola bernilai publik ditunjukkan oleh Falola et al (2017), Gawke et al., (2017) yang membuktikan bahwa keterlibatan pegawai mempunyai pengaruh terhadap tata kelola organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta et al., (2015) menunjukkan intrapreneurship yang diterapkan di sebuah korporasi akan meningkatkan tata kelola korporasi. Penelitian tentang digital literasi terhadap tata kelola publik dilakukan oleh Kaeophanuek, et al. (2018) yang menunjukkan literasi digital yang dimiliki oleh pegawai memiliki dampak positif terhadap implementasi tata kelola korporasi. Namun hasil penelitian Marques, et al. (2021) intrapreneurship tidak berpengaruh untuk meningkatkan tata kelola dan keunggulan bersaing. Perbedaan hasil penelitian ini merupakan celah (gap) untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tema yang sama.

Inovasi yang dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah akan mampu meningkatkan tata kelola bernilai publik. Karena pemerintah daerah akan menjalankan seluruh program daerahnya dengan mengedepankan inovasi agar program tersebut dapat terlaksana. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian De Oliveira & Dos Santos Júnior (2018) dan Richard (2024) yang menyatakan inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola organisasi pemerintahan. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Crosby et al.,(2017) yang menyatakan inovasi tidak berpengaruh terhadap tata kelola di daerah terpencil. menyatakan inovasi kolaboratif masih belum dapat diterapkan untuk mencapai public value, sehingga hasil ini menjadi celah (gap) penelitian yang akan datang.

Novelty penelitian ini adalah penggunaan konsep keterlibatan intrapreneurship digital merupakan perpaduan dari beberapa konsep, yaitu keterlibatan pegawai (employee engagement), intrapreneurship, dan literasi digital. Keterlibatan pegawai menggambarkan kondisi di mana pegawai secara aktif menjalankan tugas yang diberikan. Perilaku ini mencakup keterlibatan dalam pekerjaan, antusiasme dalam melaksanakan tugas, dan rasa puas dengan pekerjaan yang dilakukan. Keterlibatan pegawai dipahami sebagai aktivitas partisipatif yang melibatkan seluruh kapasitas dan komitmen pegawai untuk mendorong keberhasilan organisasi (Gupta et al., 2015). Keterlibatan pegawai yang menunjukkan sikap, sifat, dan prinsip kerja yang mengadopsi nilai-nilai serta jiwa kewirausahaan dalam pekerjaannya dikenal sebagai intrapreneurship (Morisson & Doussineau, 2019), (Gygli et al., 2019), (Rivera, 2017). Penerapan intrapreneurship merupakan kebijakan, strategi, dan budaya yang diterapkan oleh organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi

baik di dalam maupun di luar organisasi, melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang ada ( Kaeophanuek, et al., 2018). Adapun konsep literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi (Camagni & Capello, 2017), (Benaddi et al., 2022), (Tonelli et al., 2017).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan jenis eksplanatif untuk menguji kebenaran hipotesis serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Populasi penelitian adalah seluruh sekretaris lurah, lurah, sekretaris camat dan camat yang berada di wilayah kerja Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner tertutup dimana jawaban pertanyaan penelitian diberi skala penilaian dengan skala likert. Metode penyebaran kuesioner menggunakan google form, dimana link google form disebarkan melalui pesan singkat whatapp ke masing masing sekretaris lurah, lurah, sekretaris camat dan camat yang berada di wilayah kerja Kota Tangerang.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas , yaitu keterlibatan intrapreneurship digital (X1), dan inovasi layanan daerah (X2), sedangkan satu variabel bebas, yaitu tata kelola bernilai publik berkelanjutan (Y). Definisi operasional variabel penelitian ditunjukkan dalam tabel 1:

Tabel 1.  
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel.

Jenis variabel	Nama variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator
Variabel bebas	Keterlibatan <i>Intrapreneurship</i> Digital (X1)	Sikap, jiwa, semangat, dedikasi dan perilaku pegawai organisasi yang bersifat proaktif, kreatif, inovatif dan berorientasi ke masa depan dalam menjalankan pekerjaan yang didukung dan difasilitasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi secara digital.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat kerja dan dedikasi menjalankan pekerjaan,</li> <li>2. Mengutamakan pekerjaan dan mampu menyelesaikan pekerjaan,</li> <li>3. Penggunaan dan kemampuan teknologi informasi untuk bekerja secara proaktif, kreatif dan inovatif</li> <li>4. Penggunaan social media untuk melakukan efektivitas bekerja,</li> <li>5. Kreativitas dalam pekerjaan dengan menggunakan perangkat digital,</li> </ol>

			6. Ketersediaan perangkat digital yang menunjang pekerjaan (Ricard <i>et al.</i> , (2017), Pinchot dan Soltanifar (2021).(Irawan, 2022)
	Inovasi Layanan Daerah (X2)	Inovasi adalah solusi yang berguna, satu-satunya solusi selama periode dengan tekanan ekonomi yang kuat	1. <i>Product Innovation</i> , 2. <i>Process Innovation</i> , 3. <i>Ancillary Innovation</i> .  (Tönurist <i>et al.</i> ,2015)
Variabel terikat	Tata kelola bernilai publik berkelanjutan (Y)	Tata kelola bernilai publik merupakan bentuk sinergitas dari para pemimpin organisasi mewujudkan nilai publik untuk mencapai dinamika strategis komponen pelayanan publik. (Arsid <i>et al.</i> , 2019)	1. <i>Quality public services</i> , 2. <i>Effectiveness of public organisations</i> 3. <i>Achievement of socially desirable outcomes</i>  (Arsid <i>et al.</i> , 2019)

Sumber: (Ricard *et al.*, (2017), Pinchot dan Soltanifar (2021) (Irawan, 2022), (Arsid *et al.*, 2019)

Teknik analisis dilakukan melalui pengukuran yang berupa angka dengan menggunakan metode statistik. Hasil pengujian dalam penelitian ini dianalisis menggunakan program SPSS versi 26. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kuesioner dapat dianggap valid. Sebuah kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mampu mengungkapkan hal yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Koefisien korelasi yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% (level of significance) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut sah untuk menjadi indikator.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas dapat diukur melalui pengukuran tunggal, yaitu dengan membandingkan hasil dari satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Sekaran (2017) menyatakan bahwa reliabilitas suatu variabel dianggap baik jika memiliki nilai Cronbach's alpha > 0,60 ( $\alpha > 0,60$ ). Oleh karena itu, pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat diandalkan dalam memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya.

c. Uji Asumsi Klasik

Pengujian uji asumsi klasik terdiri dari:

i. Uji Normalitas

Menurut Sekaran (2017), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Jika asumsi

ini tidak terpenuhi, maka uji statistik dapat menjadi tidak valid, terutama pada sampel yang kecil. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, atau dengan memeriksa penyebaran data pada grafik scatter plot yang menunjukkan titik-titik residual pada sumbu diagonal, atau dengan melihat histogram residual. Uji normalitas juga bisa dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

ii. Uji Multikolonieritas

Menurut Sekaran (2017), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika ada korelasi antar variabel independen, hal ini disebut multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas, penelitian ini menggunakan metode Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih besar dari 10, maka terdapat masalah multikolonieritas antar variabel independen. Sebaliknya, jika VIF kurang dari 10, maka tidak ada multikolonieritas.

iii. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Jika varians residual antar pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians residual berbeda antar pengamatan, maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016), analisis regresi linier berganda tidak hanya digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel, tetapi juga untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Variabel dependen dianggap sebagai variabel acak atau stokastik, yang berarti memiliki distribusi probabilistik. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Tabel 2.  
Uji Validitas

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X111	0,899	0,297	Valid
X112	0,414	0,297	Valid
X121	0,437	0,297	Valid
X122	0,446	0,297	Valid
X131	0,301	0,297	Valid
X132	0,359	0,297	Valid
X141	0,333	0,297	Valid
X142	0,551	0,297	Valid
X151	0,465	0,297	Valid
X152	0,492	0,297	Valid
X161	0,789	0,297	Valid
X162	0,622	0,297	Valid

<b>Pernyataan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X211	0,704	0,297	Valid
X212	0,719	0,297	Valid
X221	0,629	0,297	Valid
X222	0,950	0,297	Valid
X231	0,781	0,297	Valid
X232	0,822	0,297	Valid
Y111	0,540	0,297	Valid
Y112	0,593	0,297	Valid
Y121	0,657	0,297	Valid
Y122	0,771	0,297	Valid
Y131	0,812	0,297	Valid
Y132	0,762	0,297	Valid

*Sumber: Hasil olah data SPSS 26, Tahun 2024.*

Berdasarkan hasil uji validitas untuk menguji keabsahan instrumen penelitian kuesioner, maka hasil r hitung untuk pertanyaan kuesioner melebihi nilai r tabel pada level signifikan 5%. Sehingga hasil pengujian untuk masing masing pernyataan adalah valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas kuesioner penelitian yang akurat dan dapat dipercaya dilihat dari syarat suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel adalah jika nilai alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. Uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.

#### Uji Reliabilitas

<b>Cronbach Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
0,955	Reliabilitas sempurna

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 26, menunjukkan nilai cronbach alpha 0,955. Hasil tersebut menunjukkan instrumen penelitian dikategorikan reliabilitas sempurna.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum menganalisis data, untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian ini diperlukan untuk menghindari adanya bias dalam data, mengingat tidak semua data dapat diterapkan pada model regresi secara langsung. Beberapa jenis uji asumsi klasik yang umum dilakukan antara lain: Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji autokorelasi, dan Uji heteroskedastisitas.

#### **Uji normalitas**

Uji normalitas dilihat dari hasil perhitungan uji skewness dan kurtosis dengan ketentuan apabila hasil perhitungan rasio uji skewness dan kurtosis berada diantara -2 dan +2, maka data terdistribusi secara normal sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4:

Tabel 4.



### Uji Normalitas

Variabel	Skewness			Kurtosis			Keterangan
	Statistic	Std error	Ratio	Statistic	Std error	Ratio	
X1	0,524	0,357	1,467	-0,652	0,702	-0,928	Terdistribusi normal
X2	0,626	0,357	1,753	-0,642	0,702	-0,914	Terdistribusi normal
Y	0,712	0,357	1,994	0,797	0,702	1,135	Terdistribusi normal

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, Tahun 2024

### Uji Multikolinier

Untuk menguji gejala multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat nilai VIF dari hasil perhitungan statistik sebagai berikut:

Tabel 5.

#### Uji multikolinier

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,190	,478		2,489	,017			
	X1	,075	,145	,060	1,515	,029	,521	,552	1,810
	X2	,836	,113	,869	7,424	,000	,829	,552	1,810

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, Tahun 2024

Hasil perhitungan nilai VIF, menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka diindikasikan model tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi dapat dilihat dari hasil perhitungan Durbin-Watson Statistik akan muncul pada tabel Model Summary, berikut adalah perhitungannya:

Tabel 6.

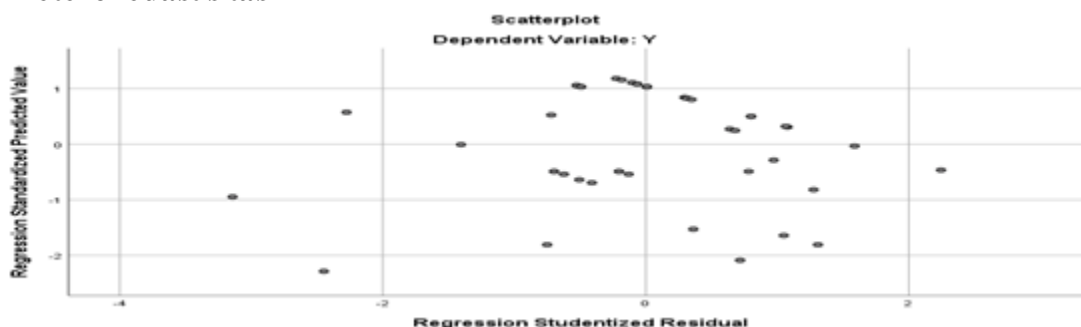
#### Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,830 <sup>a</sup>	,689	,674	,34406	45,490	2	41	,000	1,229

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, Tahun 2024

Nilai derajat kepercayaan 5%, sampel sebanyak 45 item, dan variabel penjelas sebanyak 2 maka dapatkan nilai dL dan dU sebesar 1,078 dan 1,660. Maka dapat disimpulkan model penelitian tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Uji Heterokedastisitas



Gambar 1.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar Scatter Plot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Pada gambar 1 menunjukkan hasil pengujian gejala heterokedastisitas tidak terjadi, hal ini dikarenakan sebaran data yang menyebar dan tidak menunjukkan suatu pola tertentu, sehingga model penelitian ini terhindar dari gejala heterokedastisitas.

### Uji Regresi

Hasil uji regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas (keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah) terhadap variabel tidak bebas (tata kelola bernilai publik berkelanjutan). Berikut adalah hasil uji regresi:

Tabel 7.  
Uji Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,830 <sup>a</sup>	,689	,674	,34406

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, Tahun 2024

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas (keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah) terhadap variabel tidak bebas (tata kelola bernilai publik berkelanjutan) yaitu Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,674 atau 67,4 % besarnya pengaruh variabel prediktor dapat menjelaskan keragaman model. Sedangkan sisanya 32,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: uji t dan uji F, Berikut perhitungannya:

#### Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagaimana hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 8.

#### Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,190	,478		2,489	,017
	X1	,075	,145	,060	1,515	,019
	X2	,836	,113	,869	7,424	,000

Sumber: Data diolah SPSS 26, Tahun 2024.

Hasil perhitungan menunjukkan persamaan regresi liner berganda yaitu:

$$Y = 1,190 + 0,075X_1 + 0,836X_2 + e$$

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) memiliki nilai positif sebesar 1,190 menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel X1 dan X2, bernilai 0, maka Y secara rata-rata adalah 1,190.

Nilai koefisien regresi X1 memiliki nilai positif sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan jika X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan naik sebesar 0,075. Nilai koefisien regresi untuk variabel X2 memiliki nilai positif sebesar 0,836. Hal ini menunjukkan jika X2 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar 0,836.

Berdasarkan persamaan tersebut, maka variabel yang mempunyai pengaruh paling besar adalah inovasi layanan daerah terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan.

Uji t yaitu pengujian pengaruh variabel bebas secara parsial dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.05. Berdasarkan tabel 8 nilai koefisien uji t untuk variabel keterlibatan intrapreneurship digital adalah 1,515 dan tingkat signifikansi 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan intrapreneurship digital berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik pada tingkat signifikan kurang dari 0,05. Uji t untuk variabel inovasi layanan publik memiliki koefisien 0,869 dan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan inovasi layanan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan pada tingkat signifikan kurang dari 0,05.

#### Uji F

Uji F digunakan dalam penelitian untuk menguji pengaruh simultan dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9.  
Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,770	2	5,385	45,490	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4,853	41	,118		
	Total	15,623	43			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah SPSS 26, Tahun 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan pengaruh simultan variabel bebas yaitu keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah secara bersama sama berpengaruh terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Uji F ditunjukkan dengan nilai koefisien F sebesar 45.490 dan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah secara bersama sama berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan pada tingkat signifikan kurang dari 0,05.

#### Pembahasan

Penelitian ini mengemukakan tentang pentingnya peningkatan tata kelola bernilai publik yang dilakukan oleh daerah dan didukung oleh bagian internal maupun eksternal dalam sistem pemerintahan daerah dapat menciptakan nilai (value) dalam pelaksanaan tata kelola organisasi. Tata kelola publik berfokus pada implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik, yang mencakup perilaku serta kontribusi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Keterlibatan intrapreneurship yang didukung oleh penguasaan literasi digital yang dikuasai oleh pegawai ASN daerah akan meningkatkan keberhasilan penerapan tata kelola yang bernilai publik. Semakin kuat dukungan terhadap keterlibatan intrapreneurship digital, semakin besar kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tata kelola yang bernilai publik. Hal ini dikarenakan pegawai ASN daerah merupakan ujung tombak sumber daya manusia yang dapat mendukung dan mengimplementasikan seluruh program kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Peran serta pegawai ASN daerah ini ditunjukkan sebagai keterlibatan intrapreneurship digital yang memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Hasil

penelitian menunjukkan keterlibatan intrapreneurship digital berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan secara signifikan. Artinya keterlibatan intrapreneurship digital berdampak positif dan secara nyata terhadap peningkatan keberhasilan tata kelola bernilai publik berkelanjutan pada pemerintahan kota Tangerang. Hasil ini mendukung teori stakeholder yang menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Teori stakeholder menghendaki penyelenggaraan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan sistematis dan dinamis serta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia.

Inovasi layanan daerah yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat maupun bagi para pemangku kepentingan sangat berperan bagi peningkatan tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Kebijakan pemerintah daerah kota Tangerang untuk melakukan inovasi layanan bagi para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan perbaikan layanan agar lebih efektif, efektif dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Inovasi layanan daerah yang meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan keberhasilan tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan inovasi layanan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan secara signifikan. Hal ini berarti bahwa inovasi layanan daerah berdampak positif dan secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan tata kelola bernilai publik berkelanjutan pada pemerintahan kota Tangerang. Hasil ini mendukung teori stakeholder dimana inovasi layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selayaknya dibuat dalam suatu sistem inovasi sebagai hasil dari proses interaktif yang melibatkan baik faktor internal maupun eksternal organisasi. Proses inovasi berlangsung secara berkelanjutan dan melibatkan interaksi antara berbagai organisasi yang memperoleh, mengembangkan, serta saling bertukar berbagai jenis pengetahuan, informasi, dan sumber daya lainnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan daerah terhadap tata kelola bernilai publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa persepsi responden dalam hal ini pegawai ASN daerah Kota Tangerang dengan pertimbangan bahwa pegawai ASN daerah Kota Tangerang ini merupakan ujung tombak keberhasilan tata kelola bernilai publik berkelanjutan karena pegawai ASN daerah merupakan pemeran utama yang melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja pemerintah daerah. Keterlibatan ASN pegawai daerah yang menjunjung tinggi nilai intrapreneurship digital dan mampu berinovasi dalam menjalankan pekerjaan mampu meningkatkan keberhasilan tata kelola bernilai publik berkelanjutan. Hal ini didukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan intrapreneurship digital dan inovasi layanan publik baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap tata kelola bernilai publik berkelanjutan pada pemerintah Kota Tangerang. Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan jumlah responden yang hanya diwakili oleh pegawai ASN daerah dengan lingkup pekerjaan teknis di masing masing kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Tangerang, sehingga belum dapat mencerminkan seluruh persepsi pegawai ASN daerah yang tersebar di seluruh dinas dibawah naungan pemerintah Kota Tangerang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, T., Hirawan, Herlyna B., Kosasih, A. (2024). Memperkuat Good Governance Melalui Implementasi SP4N-LAPOR di Kota Tangerang. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 1(1), 14–26.
- Alonso, J. M., Clifton, J., & Díaz-Fuentes, D. (2015). Did New Public Management Matter? An empirical analysis of the outsourcing and decentralization effects on public sector size. *Public Management Review*, 17(5), 643–660. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.822532>
- Alpkan, L., & Gemici, E. (2016). Disruption and Ambidexterity: How Innovation Strategies Evolve? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 235(October), 782–787. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.080>
- Andrews, L. (2019). Public administration, public leadership and the construction of public value in the age of the algorithm and ‘big data.’ *Public Administration*, 97(2), 296–310. <https://doi.org/10.1111/padm.12534>
- AnggrianiLamsyah. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Arshi, T., & Rao, V. (2019). Assessing impact of employee engagement on innovation and the mediating role of readiness for innovation. *International Journal of Comparative Management*, 2(2), 174. <https://doi.org/10.1504/ijcm.2019.100857>
- Arsid, A., Widianingsih, I., Nurasa, H., & Muhtar, E. A. (2019). Implementasi master strategi dalam menciptakan nilai publik pada PDAM TKR Kabupaten Tangerang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2411>
- Benaddi, H., Hannad, Y., El Kettani, E., & Askour, M. (2022). Innovation in Public Services: The Case of Moroccan Government. *Lex Localis*, 20(4), 989–1010. [https://doi.org/10.4335/20.4.989-1010\(2022\)](https://doi.org/10.4335/20.4.989-1010(2022))
- Bentzen, T. Ø., Sørensen, E., & Torfing, J. (2020). Strengthening public service production, administrative problem solving, and political leadership through co-creation of innovative public value outcomes? *Innovation Journal*, 25(1).
- Blanka, C. (2019). An individual-level perspective on intrapreneurship: a review and ways forward. *Review of Managerial Science*, 13(5), 919–961. <https://doi.org/10.1007/s11846-018-0277-0>
- Camagni, R., & Capello, R. (2017). Regional innovation patterns and the EU regional policy reform: Towards smart innovation policies. *Seminal Studies in Regional and Urban Economics: Contributions from an Impressive Mind*, 313–343. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1_16)
- Clausen, T. H., Demircioglu, M. A., & Alsos, G. A. (2020). Intensity of innovation in public sector organizations: The role of push and pull factors. *Public Administration*, 98(1), 159–176. <https://doi.org/10.1111/padm.12617>
- Falola, H. O., Salau, O. P., Olokundun, M. A., & Ibidunni, A. S. (2017). Developing a Model for Employees’ Intrapreneurial Engagement and Organizational Survival. *Covenant Journal of Entrepreneurship*, 1(2), 1–8.
- Gawke, J. C., Gorgievski, M. J., & Bakker, A. B. (2017). Employee intrapreneurship and work engagement: A latent change score approach. *Journal of Vocational Behavior*, 100, 88–100. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.03.002>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 ((Edisi 8))*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, M., Acharya, A., & Gupta, R. (2015). Impact of work engagement on performance in indian higher education system. *Review of European Studies*, 7(3), 192–201. <https://doi.org/10.5539/res.v7n3p192>
- Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N., & Sturm, J. E. (2019). The KOF Globalisation Index – revisited. *Review of International Organizations*, 14(3), 543–574. <https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2>
- Irawan, N. (2022). Digital entrepreneurship: Impact on business and society. In *Journal of Business & Finance Librarianship* (Vol. 27, Issue 2).

- <https://doi.org/10.1080/08963568.2021.2004356>
- Kaeophanuek, S., Jaitip, N.-S., & Nilsook, P. (2018). How to Enhance Digital Literacy Skills among Information Sciences Students. *International Journal of Information and Education Technology*, 8(4), 292–297. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2018.8.4.1050>
- Lewis, J. M., Ricard, L. M., & Klijn, E. H. (2018). How innovation drivers, networking and leadership shape public sector innovation capacity. *International Review of Administrative Sciences*, 84(2), 288–307. <https://doi.org/10.1177/0020852317694085>
- Morisson, A., & Doussineau, M. (2019). Regional innovation governance and place-based policies: design, implementation and implications. *Regional Studies, Regional Science*, 6(1), 101–116. <https://doi.org/10.1080/21681376.2019.1578257>
- Marques, C. S., Lopes, C., Braga, V., Ratten, V., & Santos, G. (2022). Intuition and rationality in intrapreneurship and innovation outputs: The case of health professionals in primary health care. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 18(2), 579–602. <https://doi.org/10.1007/s11365-021-00761-7>
- Neessen, P. C. M., Caniëls, M. C. J., Vos, B., & de Jong, J. P. (2019). The intrapreneurial employee: toward an integrated model of intrapreneurship and research agenda. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 15(2), 545–571. <https://doi.org/10.1007/s11365-018-0552-1>
- Oliveira, L. F. De. (2020). Open Innovation in the Public Sector : Proceedings of the Ninth International Public Value Innovation : A Theoretical Framework Based on System Dynamics. July 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-96661-8>
- Pasolong, H. (2017). *Teori Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Richard, M. (2024). *Public service innovation a typology* Chen, Jiyao; Walker, Richard M.; Sawhney, Mohanbir.
- Rivera, M. J. (2017). Leveraging innovation & intrapreneurship as a source for organizational growth. *International Journal of Innovation Science*, 9(2), 137–152. <https://doi.org/10.1108/IJIS-12-2016-0057>
- Rosa, I. da. (2018). Governance of Digital Transformation in the Public Sector: The case of Public E-Procurement in Europe”. 15–17.
- Scupola, A., & Zanfei, A. (2016). Governance and innovation in public sector services: The case of the digital library. *Government Information Quarterly*, 33(2), 237–249. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.005>
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Staub, S., Nart, S., & Dayan, H. (2019). The Role of Supportive Leader in Influencing Intrapreneurship and Innovation: A Study on the Printing Houses in Topkapi, Istanbul. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 16(4), 1–11. <https://doi.org/10.1142/S021987701940008X>
- Tonelli, A. O., de Souza Bermejo, P. H., Aparecida dos Santos, P., Zuppo, L., & Zambalde, A. L. (2017). It governance in the public sector: a conceptual model. *Information Systems Frontiers*, 19(3), 593–610. <https://doi.org/10.1007/s10796-015-9614-x>
- Van der Steen, M., van Twist, M. J. W., & Bressers, D. (2018). The Sedimentation of Public Values: How a Variety of Governance Perspectives Guide the Practical Actions of Civil Servants. *Review of Public Personnel Administration*, 38(4), 387–414. <https://doi.org/10.1177/0734371X16671369>.